

**ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
LEGISLATIF TAHUN 2009 DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

HOKTA SUPERMEN

05 153 075



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS 2010

ABSTRAK

Penelitian ini menguji, bagaimana tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilihan umum anggota legislatif 2009 di Provinsi Sumatera Barat dalam pelaporan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara partai politik peserta pemilu yang mendapat kursi dengan yang tidak mendapatkan kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk menguji perbedaan tingkat kepatuhan pada penelitian ini, digunakan data sekunder dari laporan audit dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2009 di Sumatera Barat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2009 di Sumatera Barat yang mendapatkan kursi sebesar 90% dan tingkat kepatuhan partai politik yang tidak mendapatkan kursi sebesar 65%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang cukup signifikan antara partai yang mendapat kursi dengan yang tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dimana partai yang mendapat kursi patuh atas prosedur sedangkan partai yang tidak mendapat kursi tidak patuh.

Kata Kunci: Partai Politik, Audit Laporan dana kampanye, Kepatuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari proses rekrutmen pejabat yang akan mengisi jabatan politik di Indonesia, seperti anggota Lembaga Legislatif, Kepala Daerah dan Kepala Negara memiliki kaitan yang erat dengan anggaran yang disediakan oleh Negara sehingga tujuan dari pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil sebagai salah satu instrumen demokrasi yang paling penting, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan Pemilu 2009 menghabiskan anggaran negara sekitar 13,5 triliun Rupiah. Hal ini dirasakan cukup membebani APBN Indonesia yang berjumlah sekitar 1.000 triliun Rupiah atau setara dengan 1,35% dari APBN 2009. Kebutuhan dana untuk pemilu tersebut belum lagi termasuk biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkan atas pemilu tersebut yang cukup besar, seperti anggaran yang disediakan oleh peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan dalam rangka upaya untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Anggaran yang dikeluarkan yang begitu besar seharusnya dapat menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pengelola negara dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Transisi menuju demokrasi yang dialami oleh Indonesia, semenjak tahun 1998 juga telah menyita perhatian yang luar biasa besar dari seluruh elemen

masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pun meningkat, jumlah partai politik peserta pemilu meningkat secara signifikan, pada era orde baru hanya 3 (tiga) partai politik sebagai peserta pemilu. Setelah era reformasi 48 partai politik mengikuti pemilu 1999 dan pemilu 2004 sebanyak 24 partai politik. 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal Nanggroe Aceh Darussalam menjadi peserta pemilu. Media massa, akademisi, pengamat politik dan elemen lainnya juga semakin besar perhatiannya untuk pemilu.

Partai politik merupakan media rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat 1). Dengan demikian, partai politik memegang peranan utama dalam proses demokrasi, mulai dari seleksi calon anggota legislatif sampai pencalonan pasangan kepala daerah dan kepala negara. Sesuai dengan konstitusi negara bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan kepala negara. Oleh karena itu partai politik berupaya sedemikian rupa untuk memenangkan setiap pemilu yang diikutinya demi tercapai tujuan partai dan tujuan negara. Dengan jumlah partai politik yang begitu banyak tidak bisa dihindarkan lagi akan menimbulkan tingkat persaingan antar partai politik yang ketat, sehingga anggaran dana yang akan dibelanjakan dalam berkampanye menjadi besar.

Jika pendanaan kampanye partai politik untuk pemilu tidak diatur sedemikian rupa, maka upaya mewujudkan *good government governance* akan sulit diwujudkan. Tanpa adanya aturan yang jelas dan mengikat bagi seluruh *stakeholders*, maka proses pelaksanaan Pemilu dapat memicu berbagai konflik dan sengketa. KPU, partai politik, dan berbagai pihak terkait lainnya kemudian hanya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan partai politik dalam pelaporan dana kampanye pada pemilu legislatif 2009. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partai politik peserta pemilu legislatif 2009 di provinsi Sumbar sebanyak 44 partai politik dimana hanya 33 partai politik yang menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPUD Sumbar yang kemudian dilaksanakan audit oleh KAP dengan prosedur audit yang disepakati (*agreed upon procedures*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan atas prosedur pelaporan dana kampanye yang tinggi oleh partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumbar, yaitu dengan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 90%, yang dapat dikategorikan patuh. Hanya Partai Bulan Bintang yang dikategorikan tidak patuh.
2. Tingkat kepatuhan atas Partai politik peserta pemilu yang tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi Sumbar memiliki tingkat kepatuhan rata-rata kurang, yakni dengan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 65%, yang dapat dikategorikan kurang patuh. Partai politik yang dikategorikan patuh adalah PPRN, PKDI, PDS, P. PEMUDA, P. PELOPOR, PNBKI, PMB, dan P. REPUBLIKAN.
3. Rata-rata tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilu legislatif di Provinsi Sumbar tahun 2009 adalah sebesar 73% yang dapat dikategorikan patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Riahi dan Berkauli. 2000. **Teori Akuntansi**. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfahri, 2007. **Resume Kewarganegaraan**. Ditelusuri 15 Februari 2009. <http://www.alfahri.blogspot.com>.
- Almond, Gabriel A. and James S. Coleman. 1960. **The Politics of Developing Areas**. New Jersey: Princeton University Press.
- Arens dkk. 2008. **Auditing and Assurance Services-An Integrated Approach**. 12th edition. Pearson Education.
- Basri, Seta. 2009. **Sistem Kepartaian dan Partai Politik**. www.setabasri.blogspot.com
- Boynton dkk. 2006. **Modern Auditing: Assurance Services, and the Integrity of Financial Reporting**. 8th edition. John Wiley & Sons.
- Budiardjo, Miriam. 2004. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- McKay, David. 2005. **American Politics and Society**, 6th Edition. Malden: Blackwell Publishing.
- Hanifalia. 2005. **Analisis Kepatuhan Peserta Pilkada Dalam Penyusunan Laporan Dana Kampanye Di Sumatera Barat Tahun 2005**. Padang: Skripsi.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001. **Standar Profesional Akuntan Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta. Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Komisi Pemilihan Umum, 2009. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2009**. <http://www.kpu.go.id>.